

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

- 1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.**

Penentuan jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) didasarkan pada **Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020** tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Selanjutnya dilakukan pemantauan harga bapokting pada 3 (pasar) pasar tradisional di Kota Pekalongan selama periode Triwulan I Tahun 2025 (bulan Januari - Maret 2025) melalui website SIPEOKMAS (Sistem Informasi Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat) Kota Pekalongan. Fluktuasi harga pada 13 (tiga belas) barang kebutuhan pokok dan barang penting selama rentang waktu bulan Januari hingga Maret 2025 harga rata-rata komoditas kebutuhan masyarakat relatif **stabil** dan tidak terdapat gejolak harga yang signifikan selama 3 bulan (bulan Januari - Maret) terakhir;

1. Secara nasional, rata-rata harga cabai merah pada minggu ketiga Januari 2025 berada di dalam rentang Harga Acuan Penjualan (HAP) dan naik sebesar 36,56% dibanding Desember 2024. Sedangkan untuk cabai rawit, harga pada minggu ketiga Januari 2025 berada di atas rentang HAP dan naik sebesar 47,51% dibanding Desember 2024. Untuk bawang merah, masih berada di dalam rentang HAP dan naik sebesar 1,82%, dan harga telur ayam ras masih berada di atas rentang HAP, naik sebesar 2,89%.
2. Rata-rata harga daging ayam ras berada di bawah rentang HAP dan naik sebesar 1,98% dibanding Desember 2024. Sementara, harga minyak goreng berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan naik sebesar 0,95%. Kemudian, harga bawang putih masih di atas rentang HAP dan naik sebesar 1,08%, serta harga beras berada di atas harga HET dan naik sebesar 0,11%.
3. Komoditas pada bulan Januari beras premium sebesar Rp. 15.000, sampai dengan bulan Maret tetap stabil tidak ada perubahan harga. dan mengalami penurunan yaitu **ayam kampung, ayam ras** masing-masing sebesar Rp. 61.000,- ayam kampung, Rp. 28.000,-, ayam ras;
4. Harga bawang merah naik 13,93 persen dan terjadi di 72,50 persen wilayah Indonesia; Harga cabai rawit naik 20,32 persen dan terjadi di 63,33 persen wilayah Indonesia; Harga daging ayam ras naik 0,98 persen dan terjadi di 49,44 persen wilayah Indonesia; Harga minyak goreng naik 0,02 persen dan terjadi di 41,94 persen wilayah Indonesia; Harga cabai merah naik 0,14 persen dan terjadi di 39,44 persen wilayah Indonesia; dan Harga gula pasir naik 0,87 persen dan terjadi di 36,39 persen wilayah Indonesia.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- 1. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.**

Kendala yang masih dihadapi oleh TPID Kota Pekalongan dalam melaksanakan strategi pengendalian inflasi 4K hingga periode Triwulan I Tahun 2025 ini, antara lain:

1. Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian sehingga produksi pangan semakin menurun;
2. Mekanisme pasar menjadi salah satu faktor pembentuk harga pada komoditas pangan,

seperti cabe rawit, cabe merah, dan bawang merah, yang tidak terkait dengan jumlah ketersediaan (supply) maupun tingkat kebutuhan/permintaan (demand);

3. Kota Pekalongan bukan merupakan daerah pemasok sehingga harga ditentukan dari daerah pemasok atau daerah penghasil
4. Cuaca dan bencana alam yang tidak dapat diprediksi, juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap jumlah ketersediaan stok yang bermuara pada fluktuasi harga pada beberapa komoditas pangan di Kota Pekalongan;

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

◦ **Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah**

Pelaksanaan Program Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kota Pekalongan pada Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :

- Rapat Koordinasi minggu II bulan Januari membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah tahun 2024 dirangkaikan dengan Pembahasan Percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) :

Hari / Tanggal : Senin / 6 Januari 2025

Tempat : Ruang Dua Negeri Setda Kota Pekalongan

Jl. Mataram No. 1 Pekalongan

Rapat dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Bp. Tito Karnavian) secara zoom meeting dan dihadiri oleh Presiden RI;

Peserta rapat, Kepala Staf Presiden, Perwakilan Panglima TNI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Menko Bidang Pangan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, Badan Urusan Logistik (Bulog), para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia;

Hasil :

1. Dalam rakor tersebut Mendagri, Tito Karnavian menyampaikan jika pada minggu pertama di awal tahun 2025 terjadi kenaikan beberapa komoditas. Dan secara umum inflasi di bulan Desember 2024 terkendali di angka 1,57% YoY lebih baik daripada tahun 2023 2,6% ada kenaikan perbulan diakibatkan nataru.
2. Bawang merah di 205 daerah kabupaten/kota, Daging ayam ras di 201 daerah kabupaten/kota, dan Minyak goreng di 174 daerah kabupaten/kota, cabai merah di 298 daerah kabupaten/kota, telur ayam ras di 242 daerah kabupaten/kota. Perang dagang antara china dengan amerika dan lain semua berpengaruh antara pola dan suplay yang berpengaruh kepada semua negara, maka dari itu kita harus mampu swasembada pangan.
3. Amalia Adininggar Widyasanti, Plt Kepala BPS RI melalui paparannya menjelaskan jika secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH pada M4 Januari 2025 lebih banyak dibandingkan Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan IPH.
4. Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo adi, upaya pengendalian inflasi dan mewujudkan kemandirian pangan berdasarkan (Perpres 81/2024). Aksi BPN menjaga stabilisasi dan inflasi pangan 2025 ada 5 yaitu :

Optimalisasi penyaluran beras SPHP pada wilayah dengan harga > HPP sebanyak 300.000 ton bulan januari-februari 2025.

- Penyaluran bantuan pangan beras kepada 16 jt KPM di bulan januari-februari 2025.
- Gerakan pangan murah tahun 2025 di 38 provinsi dan 514 kab/kota sebagai langkah pengendalian inflasi pangan.
- Fasilitasi distribusi pangan sebesar 750 ton.
- Kios pangan sebesar 453 kios pangan tersebar di Indonesia.

Isu Strategi nasional berdasarkan Perpres 81/2024.

- Rapat Koordinasi minggu III bulan Januari membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah tahun 2024 :

Hari / Tanggal : Senin / 13 Januari 2025

Tempat : Ruang Terang Bulan Setda Kota Pekalongan

Jl. Mataram No. 1 Pekalongan

Rapat dipimpin oleh Plt. Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tomsu Tohir secara zoom meeting;

Peserta rapat Kepala Staf Presiden, Perwakilan Panglima TNI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, Badan Urusan Logistik (Bulog), para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia;

Hasil :

1. Rakor dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsu Tohir.
2. Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi terhadap kinerja dan kontribusi yang diberikan oleh Kementerian/Lembaga serta jajaran di daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah khususnya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga kestabilan inflasi dan mengelola tantangan ekonomi yang ada di daerah.
3. Inflasi Indonesia secara year-on-year atau tahun ke tahun pada Desember 2024 terhadap Desember 2023 terkendali di angka 1,57 persen. Merupakan angka yang terbaik yang pernah dicapai selama Indonesia Merdeka.
4. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi Indonesia sepanjang 2024, mencapai 1,57% year on year (YoY). Artinya, inflasi tahun lalu berada di batas bawah target sasaran inflasi 2024 yang sebesar 1,5% hingga 3,5%. Laju inflasi 2024 merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan data lima tahun terakhir. Catatan BPS, inflasi juga pernah tercatat rendah, yakni sebesar 1,68% YoY pada tahun 2020 lalu. Sedangkan inflasi tahun 2023 tercatat sebesar 2,61% YoY.
5. Sepanjang tahun 2024 terjadi inflasi sebesar 1,57% dimana komponen inti memberikan andil sebesar 1,44%, komponen harga diatur pemerintah memberikan andil sebesar 0,11% dan komponen bergejolak memberikan andil 0,02%.
6. Komoditas yang sering memberikan andil inflasi bulanan Januari-Desember 2024 antara lain emas perhiasan, sigaret kretek mesin, kopi bubuk, bawang merah, daging ayam ras

dan ikan segar. Sedangkan komoditas yang sering memberikan andil deflasi bulanan Januari-Desember 2024 antara lain cabai merah, tomat, camai rawit, telur ayam ras, tarif angkutan udara dan daging ayam ras.

7. Berdasarkan indeks perkembangan harga M2 Januari 2025, terdapat 36 provinsi yang mengalami kenaikan IPH dan 2 provinsi yang mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di sebagian besar provinsi tersebut adalah cabai rawit, cabai merah dan daging ayam ras. Secara nasional, jumlah kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan IPH pada M2 Januari 2025 lebih banyak dibandingkan kabupaten/ kota yang mengalami penurunan IPH.
8. Secara nasional, rata-rata harga cabai merah pada M2 Januari 2025 berada di dalam rentang Harga Acuan Penjualan (HAP). Harga cabai merah s.d. M2 Januari 2025 naik sebesar 34,55% dibanding Desember 2024. Untuk harga telur ayam ras pada M2 Januari 2025 berada di atas HAP, harga telur ayam ras s.d. M2 Januari 2024 naik sebesar 3,41% dibanding Desember 2024. Harga minyak kita pada M2 Januari 2025 berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), secara umum harga minyak goreng s.d M2 Januari 2025 naik sebesar 0,85% dibanding Desember 2024.

- Rapat Koordinasi minggu IV bulan Januari membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah tahun 2025 dirangkaikan dengan Pembahasan Percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) :

Hari / Tanggal : Senin / 20 Januari 2025

Tempat : Ruang Dua Negeri Setda Kota Pekalongan

Jl. Mataram No. 1 Pekalongan

Rapat dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Bp. Tito Karnavian) secara zoom meeting;

Peserta rapat, Kepala Staf Presiden, Perwakilan Panglima TNI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Menko Bidang Pangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, Badan Urusan Logistik (Bulog), para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia;

Hasil :

1. Rakor inflasi dirangkai dengan Sosialisasi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Hari Ulang Tahun.
2. Untuk mewujudkan Delapan Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), maka Pemerintah Pusat akan melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) untuk masyarakat Indonesia.
3. Dihimbau kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota agar melaksanakan dan mengoptimalkan capaian keberhasilan PKG, dan menginstruksikan kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi PKG sesuai dengan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.
4. Pada minggu ketiga Januari 2025, terdapat 35 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks

Perkembangan Harga (IPH) dan tiga provinsi yang mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya. “Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di sebagian besar provinsi tersebut adalah cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.

5. Secara nasional, rata-rata harga cabai merah pada minggu ketiga Januari 2025 berada di dalam rentang Harga Acuan Penjualan (HAP) dan naik sebesar 36,56% dibanding Desember 2024. Sedangkan untuk cabai rawit, harga pada minggu ketiga Januari 2025 berada di atas rentang HAP dan naik sebesar 47,51% dibanding Desember 2024. Untuk bawang merah, masih berada di dalam rentang HAP dan naik sebesar 1,82%, dan harga telur ayam ras masih berada di atas rentang HAP, naik sebesar 2,89%.
 6. Rata-rata harga daging ayam ras berada di bawah rentang HAP dan naik sebesar 1,98% dibanding Desember 2024. “Sementara, harga minyak goreng berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan naik sebesar 0,95%. Kemudian, harga bawang putih masih di atas rentang HAP dan naik sebesar 1,08%, serta harga beras berada di atas harga HET dan naik sebesar 0,11%.
- Rapat Koordinasi minggu I bulan Februari membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah tahun 2025 dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah :

Hari / Tanggal : Selasa / 4 Februari 2025

Tempat : Ruang Terang Bulan Setda Kota Pekalongan

Jl. Mataram No. 1 Pekalongan

Rapat dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Bp. Tito Karnavian) secara zoom meeting;

Peserta rapat, Kepala Staf Presiden, Perwakilan Panglima TNI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Menko Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, Badan Urusan Logistik (Bulog), para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia;

Hasil :

1. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatensi kepada seluruh kepala daerah beserta jajarannya untuk dapat melakukan langkah untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga terutama komoditas yang saat ini mengalami kenaikan terlebih nanti saat menjelang datangnya bulan Ramadan.
2. Angka inflasi Januari 2025 secara y-to-y terhadap Januari 2024 berada pada angka 0.76%, di mana berdasarkan perkembangan angka inflasi tahun ke tahun, inflasi tahunan Januari 2025 lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya dan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Kemudian pada Januari 2025 juga turut terjadi deflasi m-to-m /y-to-d sebesar 0,76%.
3. Adapun penyumbang utama deflasi Januari 2025 secara m-to-m adalah kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga dengan andil deflasi 1,44%. Komoditas penyumbang utama deflasi pada kelompok ini adalah tarif Listrik.
4. Sedangkan penyumbang utama inflasi Januari 2025 secara y-on-y adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil inflasi 1,07%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah minyak goreng, sigaret kretek mesin (SKM), dan

cabai rawit.

5. Terkait Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu ke 5 Januari 2025, terdapat 35 provinsi yang mengalami kenaikan IPH dan 3 provinsi yang mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya, dengan komoditas penyumbang andil IPH di sebagian besar provinsi adalah cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.
 6. Memperkuat koordinasi dalam upaya pengendalian inflasi, terutama dengan memastikan distribusi barang tetap lancar, harga-harga terkendali, serta kebijakan ekonomi daerah selaras dengan strategi nasional. Selain itu, pengawasan perizinan daerah juga menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan.
- Rapat Koordinasi minggu II bulan Februari membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah tahun 2025 :

Hari / Tanggal : Senin / 10 Februari 2025

Tempat : Ruang Dua Negeri Setda Kota Pekalongan

Jl. Mataram No. 1 Pekalongan

Rapat dipimpin oleh Plt. Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tomsy Tohir secara zoom meeting;

Peserta rapat Kepala Staf Presiden, Perwakilan Panglima TNI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, Badan Urusan Logistik (Bulog), para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia;

Hasil :

1. Plt Sekjen Kemendagri mengingatkan semua pihak terutama TPID agar waspada terhadap kenaikan harga barang dan terjadinya inflasi menjelang Bulan Ramadhan 2025 mendatang.
2. Beberapa komoditas perlu diwaspadai karena diperkirakan akan mengalami kenaikan harga, seperti minyak goreng, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang putih. Secara nasional, harga cabai merah pada minggu pertama Februari 2025 berada di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP) dan naik sebesar 7,23% dibandingkan Januari 2025. Harga Minyak juga naik 0,41%, sedangkan gula pasir meningkat 0,89%. Di sisi lain, harga cabai rawit turun 4,35%, dan bawang putih turun 0,44% dibandingkan Januari 2025.
3. Pada Januari 2025 terjadi deflasi month-to-month (m-t-m) sebesar 0,76%, dimana kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga memberikan andil deflasi terbesar yaitu 1,44%. Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi, dengan andil inflasi sebesar 0,56%.
4. Secara prinsip neraca pangan dalam kondisi aman artinya beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi dan minyak goreng, relatif memiliki stok yang cukup.
5. Dalam rangka menghadapi ramadhan dan lebaran 2025, secara stok sangat cukup bahkan sampai satu tahun ini. Tetapi ada yang perlu diantisipasi apabila ada kelonjakan harga yang pertama cabai rawit, cabai merah besar, daging ayam ras, telur, beras medium, bawang putih, minyak, kedelai.

- Rapat Koordinasi minggu III bulan Februari membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah tahun 2025 dirangkaikan dengan Pembahasan Persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2025:

Hari / Tanggal : Selasa / 17 Februari 2025

Tempat : Ruang Dua Negeri Setda Kota Pekalongan

Jl. Mataram No. 1 Pekalongan

Rapat dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Bp. Tito Karnavian) secara zoom meeting;

Peserta rapat, Kepala Staf Presiden, Perwakilan Panglima TNI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Menko Bidang Pangan, Kemneterian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, Badan Urusan Logistik (Bulog), para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia;

Hasil :

1. Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian. Dalam sambutan pengantarnya, berkenaan dengan pembahasan Persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2025, Tito Karnavian menekankan persiapan moda transportasi menjelang Ramadan dan Idul Fitri Tahun 2025/ 1446 H. Disampaikan Tito, arus lalu lintas libur Idul Fitri Tahun 2025 diprediksi terjadi mulai tanggal 28 Maret 2025 dan arus balik pada tanggal 7 April 2025.
2. Inflasi Tahun ke Tahun (Januari 2025 terhadap Januari 2024) sebesar 0,76%. Sedangkan, inflasi Bulan ke Bulan (Januari 2025 terhadap Desember 2024) sebesar -0,76%, terjadi deflasi.
3. Penyumbang utama deflasi adalah perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar -9,16%, informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -8,08%, faktor penyebab deflasi perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga karena adanya diskon 50% untuk pengguna listrik dibawah 2200 watt pada Januari dan Februari 2025, inilah yang membuat faktor deflasi. Sementara yang lain, untuk makanan, minuman dan tembakau masih positif 1,94% artinya tetap terjadi kenaikan tetapi kenaikan yang terkendali. Pada bidang lainnya seperti perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,60%, pendidikan 0,01%, kesehatan 0,40%, semua masih positif artinya daya beli masyarakat yang mana masih mengeluarkan uang untuk hal-hal yang non primer.
4. Tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga Minggu ke-2 Februari 2025 komoditas pendorong inflasi di ulan Ramadan dan Idul Fitri didominasi oleh komoditas volatile food dan beberapa komoditas administered prices.
5. Pada M2 Februari 2025, terdapat 9 provinsi yang mengalami kenaikan IPH dan 28 provinsi yang mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas penyumbang andil terbesar kenaikan IPH di 9 provinsi tersebut didominasi oleh cabai rawit. Sedangkan, secara nasional jumlah kabupaten/ kota yang mengalami penurunan IPH pada M2 Februari 2025 lebih banyak dibandingkan kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan IPH.

Rapat Koordinasi minggu IV bulan Februari membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah tahun 2025 :

Hari / Tanggal : Senin / 24 Februari 2025

Tempat : Ruang Terang Bulan Setda Kota Pekalongan

Jl. Mataram No. 1 Pekalongan

Rapat dipimpin oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tomsu Tohir secara zoom meeting;

Peserta rapat Kepala Staf Presiden, Perwakilan Panglima TNI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, Badan Urusan Logistik (Bulog), para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia;

Hasil :

1. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsu Tohir, meminta agar daerah lebih fokus terhadap poin permasalahan kenaikan inflasi di masing-masing wilayah menjelang bulan suci Ramadan.
2. Guna mengetahui mengenai perkembangan di daerah, Tomsu Tohir meminta agar tiap daerah secara bergiliran melaporkan tiap langkah yang telah dan akan dilakukan dalam mengatasi inflasi di wilayah masing-masing.
3. Plh Deputi Bidang Statistik dan Distribusi Jasa Badan Pusat Statistik, Habibullah menyampaikan bahwa berdasarkan data historis series data menjelang ramadan 2025, pada awal tahun periode Maret 2020 yang lalu ada 39 kota mengalami inflasi.
4. Berdasarkan data BPS periode ramadan bulan Maret tahun 2024, Provinsi dengan inflasi tertinggi di wilayah Sumatera adalah Sumatera Utara (0.72 persen), untuk wilayah Jawa terjadi di Provinsi Banten (0.98 persen), dan wilayah Sulawesi terjadi di Provinsi Sulawesi Utara (1.07 persen).
5. Terkait dengan disparitas harga antar daerah per 21 Februari 2025, Deputi III Kantor Staf Presiden, Edi Priyono menyampaikan bahwa beberapa komoditas menunjukkan disparitas harga yang tinggi, antara lain : telur ayam ras 20,30 persen (tinggi), cabai rawit merah 22,16 persen (tinggi) dan cabai merah besar 32.01 persen(tinggi).
6. Badan Pangan Nasional terus melakukan upaya operasi pasar pangan murah serentak di seluruh Indonesia dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang HBKN Puasa Ramadan dan Idul Fitri 2025 mulai dari 24 Februari-29 Maret 2025 yang dilaksanakan di beberapa lokasi, yaitu : Kantor Pos Indonesia (4.500 titik), UPT Kementerian Pertanian (88 UPT), Outlet PT. Charoen Pokphand Indonesia (2.200 gerai) dan Outlet PT. JAPFA Comfeed (553 gerai).

- Rapat Koordinasi minggu I bulan Maret membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah tahun 2025 :

Hari / Tanggal : Selasa / 4 Maret 2025

Tempat : Ruang Dua Negeri Setda Kota Pekalongan

Jl. Mataram No. 1 Pekalongan

Rapat dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Bp. Tito Karnavian) secara zoom meeting;

Peserta rapat, Kepala Staf Presiden, Perwakilan Panglima TNI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Menko Bidang Pangan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, Badan Urusan Logistik (Bulog), para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia;

Hasil :

1. Rapat koordinasi ini membahas berbagai aspek pengendalian inflasi, termasuk pemantauan harga dan distribusi bahan pokok, upaya intervensi pasar, serta strategi sinergi antara pemerintah daerah dan pusat di bulan Ramadhan. Sementara itu, dalam sesi akselerasi sertifikasi halal, ditekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah untuk mempercepat proses sertifikasi guna meningkatkan daya saing produk lokal, baik di pasar nasional maupun internasional.
2. Dalam arahannya Tito mengatakan Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim, sehingga peduli terhadap jaminan produk halal. Sebanyak 87,2% masyarakat Indonesia lebih memilih produk halal, sehingga sertifikasi produk halal ini sangat penting, khususnya dalam menunjang perekonomian negara.
3. Inflasi nasional year-on-year (y-o-y) bulan Februari mengalami penurunan (deflasi) yang signifikan yakni -0,09%, dibanding inflasi bulan sebelumnya yakni 0,76%. Artinya inflasi semakin baik, salah satunya karena adanya Program Bapak Presiden yaitu Subsidi Listrik pada bulan Januari dan Februari. Meskipun program tersebut sudah berakhir di bulan Maret, namun Bapak Presiden akan memberlakukan program lainnya yaitu diskon tiket pesawat hingga 14%,
4. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan harga telur ayam ras, daging ayam ras, dan bawang merah mengalami penurunan harga di bulan Februari 2025.
5. Tiga komoditas yang harus menjadi perhatian adalah bawang putih, minyak goreng, gula pasir, dan cabai merah dimana ketiga komoditas tersebut mengalami kenaikan harga di sebagian besar kabupaten/kota.

- Rapat Koordinasi minggu II bulan Maret membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah tahun 2025 :

Hari / Tanggal : Senin / 10 Maret 2025

Tempat : Ruang Dua Negeri Setda Kota Pekalongan

Jl. Mataram No. 1 Pekalongan

Rapat dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Bp. Tito Karnavian) secara zoom meeting;

Peserta rapat, Kepala Staf Presiden, Perwakilan Panglima TNI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Menko Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, Badan Urusan Logistik (Bulog), para Kepala Daerah dan Forkopimda se-

Indonesia;

Hasil :

1. Zoom Meeting Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Pembahasan Antisipasi Cuaca Ekstrem pada periode hari raya Idul Fitri 1446 H Tahun 2025. Rapat dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan melibatkan unsur kementerian/lembaga serta jajaran instansi pemerintah daerah.
 2. Pada minggu pertama bulan Maret 2025 terdapat 33 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), dan hanya 4 provinsi yang mengalami penurunan IPH serta 1 provinsi dengan kondisi IPH yang stabil dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas yang berperan dan memicu terjadinya kenaikan IPH yaitu cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras.
 3. Secara nasional rata-rata harga cabai rawit pada awal Maret ini berada diatas rentang Harga Acuan Penjualan (HAP), dengan kenaikan harga yang dialami sebesar 26,27% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, untuk rata-rata harga Minyakita pada awal Maret ini masih berada diatas harga eceran tertinggi (HET), walaupun secara umum mengalami penurunan harga sebesar 0,72% dibandingkan bulan Februari lalu.
 4. Terkait langkah - langkah mitigasi dan kesiapsiagaan bencana Hidrometeorologi yang perlu dilaksanakan khususnya pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 2025 yaitu diantaranya melakukan penetapan status siaga darurat bagi daerah yang rawan banjir/longsor, serta melakukan pemantauan debit sungai maupun tinggi permukaan air pada tanggul dan saluran drainase disaat hujan.
 5. Perlu kewaspadaan saat masa transisi musim dari hujan ke kemarau atau biasa dikenal dengan PANCARoba. Karakteristik cuaca selama periode transisi ini adalah kejadian hujan lebat dalam durasi singkat yang disertai dengan petir dan angin kencang.
- Rapat Koordinasi minggu III bulan Maret membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah tahun 2025 dirangkai Rakor penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Implementasi Program 3 Juta Rumah :

Hari / Tanggal : Senin / 17 Maret 2025

Tempat : Ruang Dua Negeri Setda Kota Pekalongan
Jl. Mataram No. 1 Pekalongan

Rapat dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Bp. Tito Karnavian) secara zoom meeting;

Peserta rapat, Kepala Staf Presiden, Perwakilan Panglima TNI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kesehatan, Menteri Transmigrasi, Kepala Badan Informasi Geospasial, Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Menko Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, Badan Urusan Logistik (Bulog), para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia;

Hasil :

Pemerintah daerah waspada terhadap kenaikan harga pangan, khususnya untuk harga

1. cabai rawit, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
2. Pada minggu pertama Maret 2025 lalu cabai rawit mengalami kenaikan di 234 kabupaten/kota, cabai merah di 224 kabupaten/kota, dan bawang merah di 216 kabupaten/kota.
3. Pada minggu kedua Maret 2025, komoditas yang mengalami kenaikan bawang merah di 243 kabupaten/kota, cabai rawit di 230 kabupaten/kota, bawang putih di 208 kabupaten/kota.
4. Rakor juga membahas tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Implementasi Program 3 Juta Rumah. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi para pihak untuk menyinergikan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial.
5. Penandatanganan nota kesepahaman ini juga sangat penting sebagai bentuk kepastian terkait masalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RTRW dan RDTR sangat krusial karena mengatur tentang posisi ruang hijau, ruang pemukiman, ruang komersial dan ruang transmigrasi.
6. Beberapa ruang lingkup nota kesepahaman meliputi percepatan pendaftaran tanah aset di areal penggunaan lain; pencegahan dan penanganan permasalahan agraria/pertanahan dan tata ruang; dukungan terhadap pelaksanaan program strategis nasional; penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; serta percepatan penyelesaian rencana tata ruang.

- Rapat Koordinasi minggu IV bulan Maret membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah tahun 2025 :

Hari / Tanggal : Senin / 24 Maret 2025

Tempat : Ruang Dua Negeri Setda Kota Pekalongan

Jl. Mataram No. 1 Pekalongan

Rapat dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Bp. Tito Karnavian) secara zoom meeting;

Peserta rapat, Kepala Staf Presiden, Perwakilan Panglima TNI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Menko Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, Badan Urusan Logistik (Bulog), para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia;

Hasil :

1. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada Triwulan IV tahun 2024 mengalami peningkatan yang pesat. Indonesia berada di peringkat 41 dari 188 negara dengan nilai pertumbuhan ekonomi (y-o-y) 5,02 persen. Sedangkan di negara G20, berada di peringkat 3 dari 24 negara, dan peringkat 5 dari 11 negara ASEAN.
2. Tingkat inflasi per Februari 2025, Indonesia berada di peringkat 13 dari 186 negara, dengan nilai inflasi -0,09 persen (y-o-y). Di negara G20, berada di peringkat 2 dari 24

negara, dan peringkat 3 dari 11 negara ASEAN.

3. Kondisi deflasi saat ini bukan karena inflasinya yang berkurang, tetapi daya beli masyarakat yang masih tinggi dan supply yang cukup. Itu yang menyebabkan terjadinya penurunan inflasi, ditambah lagi adanya subsidi Pemerintah pada sektor Listrik.
4. Perkembangan harga cabai rawit pada minggu ketiga Maret 2025 terjadi kenaikan di 228 Kabupaten/Kota dan penurunan di 63 Kabupaten/Kota. Kenaikan harga cabai rawit disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi dan hama patek di beberapa daerah.
5. Pada minggu ketiga Maret 2025, terdapat 30 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH tersebut adalah cabai rawit dan bawang merah.
6. Harga bawang merah naik 13,93 persen dan terjadi di 72,50 persen wilayah Indonesia; Harga cabai rawit naik 20,32 persen dan terjadi di 63,33 persen wilayah Indonesia; Harga daging ayam ras naik 0,98 persen dan terjadi di 49,44 persen wilayah Indonesia; Harga minyak goreng naik 0,02 persen dan terjadi di 41,94 persen wilayah Indonesia; Harga cabai merah naik 0,14 persen dan terjadi di 39,44 persen wilayah Indonesia; dan Harga gula pasir naik 0,87 persen dan terjadi di 36,39 persen wilayah Indonesia.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

◦ **Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah**

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kota Pekalongan pada Triwulan IV 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kota Pekalongan dan koordinasi dengan dengan TPID Provinsi Jawa Tengah dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan di Kota Pekalongan.
2. Kebutuhan akan inovasi dalam mendukung ketersediaan pangan sepanjang tahun dan kelancaran distribusi serta indikasi surplus devisit pangan di masing-masing daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

◦ **Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah**

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kota Pekalongan pada Triwulan IV 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan harga dan ketersediaan pasokan komoditas pangan serta kelancaran distribusi yang
2. Mengidentifikasi Strategi Aksi mengantisipasi ketersediaan pangan dalam kondisi ekstrim alam El Nino atau Kemarau Panjang
3. Melanjutkan dan meningkatkan koordinasi antar anggota TPID untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga.